

Bagian XI

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Misi Sesi Perkuliahan

- Identifikasi indikator kinerja pemerintah daerah
- Melatih keterampilan mahasiswa dalam menyusun instrumen pengukuran kinerja
- Pemaparan metode-metode pengukuran kinerja pemerintah daerah
- Memahami sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah

Substansi Sesi Perkuliahan

- Pengukuran kinerja pemerintah daerah
- Metode pengukuran kinerja pemerintah daerah
- Instrument pengukuran kinerja pemerintah daerah
- Sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah

Metode Perkuliahan

- Asinkron mandiri mempelajari modul *digital flipbook*
- Pembahasan materi melalui zoom meeting, trelo, dan podcast youtube
- Evaluasi materi melalui trelo dan be smart

A. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Pembuatan kebijakan diharapkan memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah-masalah atau setidaknya mengurangi beban masalah. Pembuatan kebijakan harus dinilai menurut tujuan dan dampak yang diinginkan membentuk titik awal evaluasi kebijakan. Namun, evaluasi tidak hanya terkait dengan tahap akhir dalam siklus kebijakan yang berakhir dengan penghentian kebijakan atau mendesain ulang berdasarkan persepsi masalah dan penyusunan agenda yang berubah. Pada saat yang sama, penelitian evaluasi membentuk sub disiplin yang terpisah dalam ilmu kebijakan yang berfokus pada hasil yang diharapkan dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan. Studi evaluasi tidak terbatas pada tahap tertentu dalam siklus kebijakan, melainkan perspektif diterapkan untuk proses pembuatan kebijakan dan dari perspektif yang berbeda dari segi waktu.

Peran evaluasi dalam proses kebijakan jauh melampaui lingkup studi evaluasi ilmiah. Evaluasi kebijakan berlangsung sebagai bagian rutin dan menyatu dari proses dan perdebatan politik. Sehingga, evaluasi ilmiah dibedakan dari evaluasi administrasi yang dilakukan atau diprakarsai oleh administrasi publik dan evaluasi politik yang dilakukan oleh berbagai macam aktor dalam arena politik, termasuk masyarakat luas dan media (Howlett dan Ramesh, 2003:210). Tidak hanya penelitian ilmiah, tetapi laporan pemerintah, debat publik dan kegiatan partai oposisi masing-masing mempunyai unsure-unsur substansial evaluasi. Juga bentuk-bentuk klasik pengawasan pemerintah dan pelayan publik dalam demokrasi oleh lembaga hukum dan anggota dewan serta kantor-kantor audit dapat dikelompokkan sebagai evaluasi.

Evaluasi dapat menyebabkan pola yang beragam dari kebijakan, dengan implikasi yang berbeda dalam hal mekanisme umpan balik dan kemungkinan pengulangan proses kebijakan. Salah satu polanya adalah kebijakan yang berhasil diperkuat, sebuah pola yang membentuk gagasan inti dari apa yang disebut proyek percontohan (atau model percobaan), dimana tindakan tertentu pertama kali diperkenalkan dalam konteks yang terbatas (territorial, substantive, dan sementara) dan hanya diperluas jika evaluasi mendukung.

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi tahap ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.